

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KURIKULUM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN BERDASARKAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) TAHUN 2020 DI MTS PERSIS 37 SUMEDANG

Eska Hifdiyah Sahal¹, Mulyawan Safwandy Nugraha²
eskahifdiyahsahal13@gmail.com¹, mulyawan@uinsgd.ac.id²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Permasalahan yang penulis temukan bersifat positif dimana kurikulum di madrasah ini mempunyai kekhasan sendiri yaitu pengembangan kurikulum tidak hanya mengutamakan dari ilmu pengetahuan umum saja akan tetapi juga lebih mengutamakan ilmu keagamaan yang porsinya lebih banyak, sehingga madrasah ini bertujuan untuk membina siswa agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam. Oleh karena itu, penulis berusaha mencari keunikan-keunikan dan informasi terkait implementasi pengelolaan kurikulum di MTs Persis 37 Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan kurikulum di MTs Persis 37 Sumedang yang berkaitan dengan 1) perencanaan kurikulum 2) pelaksanaan kurikulum dan 3) evaluasi kurikulum. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tujuan utama setiap satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengelolaan kurikulum yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pengelolaan kurikulum dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi terkini tentang implementasi pengelolaan kurikulum dalam konteks akreditasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum yang efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam IASP tahun 2020. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya peran pengelolaan kurikulum dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya upaya terus-menerus dalam mengoptimalkan implementasi pengelolaan kurikulum guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Pengelolaan Kurikulum, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP), MTs Persis 37 Sumedang.

PENDAHULUAN

Tiap Satuan Pendidikan memiliki tanggungjawab untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yaitu pengembangan kapasitas, pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang layak dan berkaitan dengan pembentukan kehidupan nasional, dengan tujuan meningkatkan kapasitas. Pendidikan menciptakan karakteristik bangsa yang kuat serta menjadi adibintang pembangunan nasional yang berlandaskan nilai dan budaya Pancasila. Pencapaian Pendidikan yang bermutu membutuhkan standart bagi Satuan Pendidikan untuk diwujudkan sebagai lembaga pendidikan yang sah yaitu sebagai badan mandiri yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang berkuasa menjalankan sertifikasi. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai standar pendidikan yang optimal, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendidikan menjadi sangat penting. Konsep ini tercermin dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) tahun 2020, yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai salah satu aspek penilaian kualitas

pendidikan sebuah lembaga. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Barkah di Cianjur adalah salah satu lembaga pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, wali murid, komunitas lokal, dan komite sekolah, dalam mendukung dan memperkuat upaya-upaya pendidikan. Implementasi konsep pelibatan masyarakat ini memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan keseluruhan pengalaman pendidikan siswa.

Pada tahun 2018 prosedur akreditasi mengalami perubahan. BANaS/M telah meluaskan perangkat akreditasi yang kontemporer dan sekarang ini dikenal dengan sebutan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) yang implementasinya dilakukan tahun 2020. Alasan dilakukannya perubahan instrumen akreditasi karena adanya dinamika dalam dunia Pendidikan yang banyak mengalami perubahan. Proses pengembangan IASP-2020 didahului dengan kegiatan pembentukan rancangan akademik dan dilanjutkan penyusunan draft IASP-2020. Draft IASP-2020 tahun 2018 sudah diuji coba dan direvisi di DKI Jakarta. Pada tahun 2019 IASP-2020 dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu IASP berlanjut di tahun 2020 dengan uji coba nasional besar-besaran di 34 Provinsi dan peluncuran aplikasi baru yaitu Monitoring Dashboards. Dashboard Monitoring adalah aplikasi yang mengevaluasi skor dan peluang penilaian kredit pendidikan, memungkinkan sekolah dengan poin akreditasi tetap untuk segera menerima sertifikat akreditasi. Selain hal di atas, akan dilaksanakan pemahaman tentang SISPENA, alat untuk menghitung nilai akreditasi hasil visitasi.

Alur proses akreditasi sekolah/madrasah dapat dilihat berdasarkan Pedoman Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan akreditasi yaitu dimulai dari sosialisasi instrumen akreditasi satuan Pendidikan (IASP). Setelah itu dilanjutkan asesmen kecukupan sasaran akreditasi, lalu dilanjutkan kelayakan visitasi. Setelah dinyatakan layak, kemudian sekolah akan divisitasi oleh tim asesor. Selanjutnya dilakukan validasi dan verifikasi hasil visitasi serta diikuti dengan penetapan akreditasi. Proses Akreditasi berakhir pada pengumuman hasil akreditasi dan penerbitan sertifikat serta penyampaian rekomendasi.

IASP 2020 mempunyai kerangka dasar yang diturunkan menjadi instrumen akreditasi yang berpola administratif maupun kinerja. Penilaian bersandar administrasi dapat dilihat berdasarkan data-data pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Education Management Information System (EMIS). Sedangkan penilaian berbasis kinerja dapat dilakukan berdasarkan teknik triangulasi data yaitu telaah dokumen, observasi, wawancara, dan diskusi grup.⁵ Sekolah yang tidak lulus penilaian berbasis kinerja tidak dapat melakukan penilaian administrative. Sekolah yang akan divisitasi, keformalitasnya ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Data Isian Akreditasi (DIA) yang diselesaikan di SISPENA. Kegiatan tersebut termasuk dalam asesmen kecukupan untuk membuktikan bahwa sekolah/madrasah telah melengkapi syarat administratif minimum dan kelengkapan dokumen seperti yang dipersyaratkan oleh IASP 2020

IASP 2020 instrumen baru sebagai instrumen kebijakan publik harus dirancang dengan pertimbangan sebagai berikut:⁶

1. Perangkat akreditasi harus selalu mempunyai karakteristik perangkat penelitian tingkat sistem sekolah/madrasah untuk mengungkap indikator yang memberikan informasi yang jelas tentang kemampuan sekolah/madrasah untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas
2. Luasnya informasinya yang diekstraksi harus masuk akal

3. Instrumen akreditasi wajib bermakna dan khas sehingga dapat menyeleksi sekolah/madrasah mana yang melakukan pekerjaan bermakna bagi proses pembelajaran dan mana yang tidak
4. Instrumen dengan kewajaran optimal memuat indikator yang bisa mengungkapkan informasi yang memberikan manfaat terbesar bagi kualitas pembelajaran
5. Menyederhanakan metode pengaktualan akreditasi sehingga proses akreditasi dapat dilaksanakan secara praktis, dalam jangka yang cukup singkat
6. Prosedur pelaksanaan akreditasi perlu lebih efisien agar tidak memboroskan sumber daya yang tidak perlu.

Dalam melakukan akreditasi di tahun 2020 BAN S/M Jawa Timur telah menggunakan IASP-2020. Dokumen IASP2020 untuk setiap jenjang pendidikan dimulai dari dokumen IASP 2020sSD/MI, dokumen IASPp2020pSMP/MTs, dokumen IASP-2020mSMA/MA, dokumen IASP2020oSMK/MAK serta dokumen IASP 2020 SLB-MLB. Adapun dokumen IASP 2020 ini berisi butir kinerja inti, butir kinerja kekhususan (kecuali jenjang SMP dan SMA), butir pemenuhan relatif dan teknik skoring.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Persis 37 Sumedang yang berada di Jalan prabu geuan ulun No.134, Regol Wetan, Kec.Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, seperti Masyarakat, guru, orang tua siswa, dan anggota komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan observasi. Analisis data dimulai dari upaya mencari makna yang diawali dengan pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Kurikulum di MTs Persis 37 Sumedang

Satuan Pendidikan formal yang dimaksud meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar Biasa (MLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat (Asy'ari et al., 2021). Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkungannya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (Hendarman, 2013; Iskanto et al., 2021; Sumarto, 2018). Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip-prinsip yang obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional (Sukarta, 2020). Tujuan Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk: 1. memberikan informasi tentang

kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan;2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan;3. memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan; dan4. memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan demikian, bagi Pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (Ansori, 2021; Luqman, 2021). Hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu. Fungsi Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:1. Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.1.Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.Pengembangan Instrumen Akreditasi Sekolah Pada tahun 2019, BAN-S/M telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun Perangkat Akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak mengingat dinamika Pendidikan.

telah banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance based) atau dari rules to principles (Damayanti et al., 2021). Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continuous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. IASP-2020 dikembangkan dengan menitikberatkan penilaian pada 4 (empat) komponen penilaian yaitu: 1. Mutu Lulusan, 2. Proses Pembelajaran, 3. Mutu Guru 4. Manajemen Sekolah/Madrasah dan mencakup jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB

Dalam implementasi kurikulum di MTs Persis 37 Sumedang menggunakan dua kurikulum, kesatu kurikulum Merdeka dan kedua kurikulum sekolah.

2. Penerapan Kurikulum Merdeka di MTs Persis 37 Sumedang

Peralihan kurikulum di MTs Persis 37 Sumedang dilaksanakan untuk menghindari tertinggalnya kemajuan pendidikan dengan dukungan dari pihak eksternal dan internal sekolah. Adapun dukungan kepala sekolah dan guru di MTs Persis 37 Sumedang saling

berusaha menerapkan kurikulum merdeka. Pada saat ini, penerapan kurikulum 2013 masih diterapkan di kelas terendah, yaitu hanya kelas X. Namun sekolah berencana akan lanjut menerapkan pada semua kelas. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa sebelum menerapkan kurikulum merdeka, pihak sekolah dan peserta didik perlu diberikan upaya adaptasi. Guru di MTs Persis 37 Sumedang dalam membuat modul menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Walaupun kurikulum merdeka belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah di Sumedang, namun dalam pelaksanaan kurikulum merdeka pada kelas X tidaklah rumit dan sulit dalam penyusunannya dibandingkan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka di kelas X MTs Persis 37 Sumedang telah menyelesaikan proyek dengan bahan utama dan dasar barang bekas berupa meja, jam dinding dan kursi dengan berkreasi dengan kreativitas masing-masing peserta didik dengan saling berkolaborasi secara berkelompok.

Penerapan kurikulum merdeka ini, siswa lebih fokus pada kreasi, pikiran-pikiran mereka tersebut tersimpan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif untuk melakukan atau membuat. Guru harus memiliki banyak ide agar pembelajaran lebih menarik, nyaman dan tersampaikan materi pembelajarannya. Namun guru seringkali tidak memiliki waktu dalam untuk mengembangkan hal-hal kreatif dan inovatif tersebut. Menurut (Nurhayati, L., Madya, S., Putro, N. H. P. S., & Triyono, 2022) guru harus bisa kritis secara aktif mampu beradaptasi dalam lingkungan masyarakat sekitar siswa. Sehingga guru perlu beradaptasi dan meyakinkan siswa dengan berusaha melaksanakan pembelajaran agar dapat berjalan lancar agar pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh untuk dalam jangka waktu yang panjang dalam kehidupannya kedepan. Hal harus dihindari selama diterapkannya kurikulum merdeka yang memiliki banyak program proyek adalah mindset peserta didik. Menghindari pemikiran siswa bahwa sekolah tidaklah menyenangkan, teman yang nakal, serta mata pelajaran yang sulit, siswa lebih ekstra untuk belajar hal tersebut memang cukup sulit bagi guru. Sehingga guru harus mengejar lebih ekstra. Guru harus mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik serta agar siswa bisa siap menerima materi baru dan siswa dituntut untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana di sekolah pada umumnya, di SMA Swasta Pontianak tentunya guru berusaha membangun siswa yang kurang berminat dalam melakukan kegiatan kedalam bentuk proyek sebagaimana P5 dalam kurikulum merdeka. Penilaian kurikulum merdeka tidak menggunakan nilai atau angka. Tetapi menggunakan indikator kurang berkembang, sangat berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Proyek sudah termasuk kedalam ketrampilan, sedangkan pengetahuan lebih ke arah capaian pembelajaran. Proyek yang di maksud yaitu memanfaatkan barang bekas yang di lakukan oleh para siswa di MTs Persis 37 Sumedang. Guru dan siswa juga harus mengkolaborasikan pembelajaran antara teknologi dengan barang bekas atau bahan alam yang akan menjadi nilai. Seperti memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil karya siswa. Menurut (Verontika et al., 2021). Implementasi peralihan kurikulum merdeka, pada pembelajaran kelas X guru merancang kegiatan proyek membuat suatu produk yang berbahan dari barang bekas. Penilaian proyek pada kurikulum merdeka mencakup nilai pengetahuan dan keterampilan dan tentunya tidak hanya penilaian yang menjadi tujuan dalam imigrasi kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Proses pembelajaran yang mencakup kemandiri, kerja sama dan kreativitas peserta didik dalam kegiatan proyek menjadi latar belakang sekolah mencoba menerapkan kurikulum merdeka tanpa secara matang kurikulum ini bisa diterapkan. Penerapan kurikulum merdeka dilakukan dengan proses yang berjalan dan evaluasi untuk menjadi lebih maksimal dan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan instrumen IASP butir inti dan instrumen butir khusus yang telah dilakukan uji coba IASP 2020, instrumen baru telah disiapkan di mana empat dari delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan penilaian terpenting IASP 2020, yaitu kualitas lulusan, kualitas pembelajaran, kualitas guru dan pengelolaan sekolah. Dalam penerapannya, proses pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2022 telah melewati proses perancangan yang begitu panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulannya adalah Implementasi Kurikulum MTs Persis 37 Sumedang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena pengelolaan kurikulum dapat menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berpusat pada kebutuhan akademis, tetapi juga kebutuhan nyata masyarakat. Di MTs Persis 37 Sumedang juga menggunakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pengelolaan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Persis 37 Sumedang, dari berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai pendekatan harus digunakan, di antaranya adalah:

- Pembuatan kurikulum yang mencakup metode pembelajaran dan sistem studi secara keseluruhan
- Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk siswa dan buku pedoman guru untuk sekolah dasar dan sekolah lanjutan, serta buku-buku pelajaran kejuruan dan teknik untuk sekolah-sekolah yang membutuhkannya dan
- Pengadaan alat peraga dan alat pendidikan lainnya untuk sekolah dasar, TK, SLB, laboratorium IPA, dan SM. Penataran guru-guru dan dosen. Pengadaan buku bacaan yang sehat dan berkualitas melalui perpustakaan sekolah.

Strategi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di MTs Al-Barkah Cianjur tidak hanya pada manajemen kurikulumnya saja akan tetapi juga dari segi yang lain, yaitu:

1. Dari segi guru
2. Dari segi siswa atau peserta didik
3. Dari segi sarana prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, Widhi Candra, Rista Dwi Jayanti, 'Peningkatan Pemahaman Satuan Pendidikan Dalam Pengisian Iasp Melalui Sosialisasi Ban S / M Jawa Timur', *Jurnal Kependidikan Islam*, 13.0 (2023), 84–97 <<https://doi.org/0.15642/jkpi.2023.13.1.84-97>>
- Andi Warisno and Z A Tabrani, „The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan Tradition“, *Advanced Science Letters*, 24.10 (2018), 7082–86
- Armstrong, T. (2020). *Building Strong School Committees: A Practical Guide* (Edisi ke-2). Halaman 78-92.
- Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2018). *Integrating Educational Technology into Teaching* (Edisi ke-7). Halaman 212-230.
- Devi Wiwien Widya Rahayu, Rohmatunazilah, Suwarno. (2017). Mengeksplorasi Perasaan Mahasiswa Internasional: Saat Kita Belajar secara Virtual selama Pandemi COVID-19. *Open Journal In Education*, 143
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action* (Edisi ke-4). Halaman 45-67.
- Fadhli, Muhammad, „Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan“, *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1.2 (2017), 215–40
- Nasbi, Ibrahim, „Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis“, *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1.2 (2017) Sulfemi,

- Handayani, A., & Pramono, R. (2018). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 112-125.
- Komariah, Aan. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Subagyo, B. (2019). Implementasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 7(1), 45-56.
- Sari, D. K., & Wibowo, A. (2020). Keterlibatan Masyarakat Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan: Studi Kasus di Desa Mulyosari. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 12(2), 89-102.
- Siti. (2018). 'Mind Mapping Sebagai Metode Alternatif Pembelajaran Akidah Akhlak', *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, 2(1), pp. 63-73. doi: <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.23>
- Tri Wulandari (2017) "Pendidikan Inklusif: Konsep, Teori, dan Implementasi" Hal: 88-105. Penerbit Bumi Aksara.